**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**REPUBLIK INDONESIA**

JALAN BUDI KEMULIAN I, JAKARTA 10110,

TELEPON (021) 3842638, 3805562 FAXIMILE (021) 3805559, 3805562

SITUS [WWW.menegpp.go.id](http://WWW.menegpp.go.id)

**NOTA DINAS**

**Nomor : ND. /KPP-PA/D.I/16/2015**

**Kepada Yth : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Dari : Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi**

**Tembusan : Sekretaris Kementerian**

**Hal : Laporan Perkembangan PUG, PPRG dan PP yang dilakukankan oleh BP3AKB Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Tanggal : Juni 2015**

**Sifat : Biasa**

Bersama ini kami sampaikan kemajuan-kemajuan yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan Pemberdayaan Perempuan, PUG serta PPRG dalam kurun waktu triwulan I.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami dari jajaran di Kedeputian I berupaya secara berkesinambungan memberikan pola pendampingan pada daerah binaan kami dengan berbagai upaya agar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait capaian yang sudah dilakukan oleh BP3AKB Provinsi Nusa Tenggara Barat :

1. Pada tanggal, 28 Februari 2015, BP3AKB telah melaksanakan “Rakor Perencanaan dan Penganggaran Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana” yang dihadiri BPPKB dan Bappeda se NTB merupakan kegiatan penting dan strategis karena tugas pembinaan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak serta menjadi kekuatan dalam melakukan rekayasa social untuk membentuk generasi emas NTB kedepan. Keberadaan Ibu dan Anak dalam pembentukan generasi merupakan satu kesatuan asset yang harus mendapatkan prioritas. Untuk itu harusnya pembinaan terhadap perempuan dan anak menjadi program unggulan. Menurut Kepala BP3AKB Dra.. T. Wismaningsih Drajadiah, secara tuntutan akan kualitas SDM perempuan paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang. Tetapi pada kenyataannya, selama ini peranserta kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor penyebab belum optimalnya peranserta perempuan dalam pembangunan karena masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan sehingga tidak mampu untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan mitra sejajarnya.

Rakorbang Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertujuan untuk :

1. Menjaring aspirasi (masukan-masukan) dari Kabupaten/Kota terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
2. Melakukan sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana antara provinsi dan kabupaten/kota se NTB.

Adapun peserta rakor r berjumlah 45 orang yang terdiri dari :

1. Peserta dari provinsi sebanyak 25 orang yang terdiri dari BP3AKB, BAPPEDA dan GIZ-SWR.
2. Peserta kabupaten/kota sebanyak 20 orang yang teridiri dari unsur BKBPP dan BAPPEDA masing-masing 1(satu) orang)
3. Pada tanggal, 2 s.d 4 Maret 2015 bertempat di Aula BP3AKB Provinsi Nusa Tenggara Barat di selenggarakan “Pelatihan Fasilitator ” Dialog Warga” untuk pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi” yang di laksanakan selama 3 hari bekerjasama dengan GIZ-SWR dan AIPD

Di Nusa Tenggara Barat fenomena pernikahan dini adalah isu yang paling kritis di Indonesia. Pada tahun 2012 5,8 % anak dibawah umur 15 tahun telah menikah di NTB sedangkan angka Nasional sebesar 2,6 %, dampak buruk dari fenomena ini antara lain angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi begitu pula dengan angka kekerasan dalam rumah tangga.  
Pada tahun 2013 pencegahan pernikahan dini menjadi salah satu prioritas BP3AKB. Setelah pengumpulan berbagai data pendukung BP3AKB bekerjasama dengan beberapa instansi/lembaga terkait, organisasi PKK, berkoordinasi untuk mengadakan sebuah seminar daerah tentang Pendewasaan Usia Perkawinan yang didukung GIZ SWR dan AIPD.

Tujuan seminar tersebut tidak hanya untuk berbagi informasi namun juga untuk menghasilkan rekomendasi dalam kegiatan bersama kedepan. Pelatihan fasilitator menerapkan metode dialog warga di tiga desa di Lombok Barat dan Lombok Tengah . Adapun yang terlibat dalam Trainer Of Fasilitator (TOF) dialog warga PUP dan Kespro tersebut antara lain BP3AKB Prov. NTB, BP2KB Kab. Loteng, perwakilan LSM, PSW Unram, Fakultas Kesehatan Masyarakat UNTB, Dinkes dan PKK. Hasil dari pelaksanaan acara tersebut ditindak lanjuti dengan program kegiatan dimasing-masing lembaga/instansi untuk mensosialisasi metode dialog warga sehingga dapat digunakan sebagai peningkatan kesadaran tentang fenomena pernihahan dini.

1. Pada tanggal, 9 April 2015 bertempat di ruang sidang II Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat diadakan “Bimtek Pendataan dan Pelaporan Data Gender Anak dan KB” Kepala KP3AKB membuka secara resmi bimbingan teknis pendataan dan pelaporan data gender anak dan KB dalam sambutannya menyampaikan Data dan Informasi sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di semua bidang, tidak terkecuali pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membutuhkan data gender/terpilah dan anak yang sangat terkait dengan seluruh bidang pembangunan. Dengan demikian, data gender/terpilah dan anak tidak hanya menjadi kebutuhan dan perhatian. Data gender/terpilah dan anak harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan data dan harus terpilah menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.  
   Data gender/terpilah dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA). Data Gender Terpilah dan anak dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk: (i) mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, termasuk anak, dalam dimensi tempat dan waktu (ii) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki; dan (iii) mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.  
   Peserta bertemuan bintek terdiri dari pengelola data yang ada di Dinas/Instansi Kabupaten Sumbawa Barat.

Tujuan pertemuan tersebut diharapkan :

1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data terpilah sebagai bahan penyusunan kebijakan program.
2. Memfasilitasi dan mendorong pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyediaan data terpilah/gender, anak dan KB.
3. Memperoleh data terpilah/gender, anak dan KB.
4. Pada tanggal, 16 April 2015 bertempat di Hotel Suci Kabupaten Sumbawa diadakan “Pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya pendewasaan usia perkawinan”

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan bahwa masih tingginya perkawinan usia muda dibawah 15 tahun yaitu sebesar 5,8 %, sementara angka Nasional 2,6 % hal ini menjadi penyebab terjadinya angka perceraian, KDRT, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan hal ini ditandai oleh angka TFR NTB yang masih berkisar 2,8 % .

Di Pulau Lombok tradisi anak perempuan dilarikan untuk dinikahkan pada umur sekolah sangat marak terjadi, anak perempuan yang di larikan oleh anak laki-laki harus di kawinkan, praktik ini sebagian besar di dukung oleh keluarga mereka, ketakutan akan hamil dan anak yang lahir di luar nikah, oleh pemuka agama dan masyarakat setempat mengesahkan pernikahan anak ini berdasarkan tradisi. Oleh karena itu maka peran tokoh masyarakat, tokoh agama sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan/informasi terkait dengan pendewasaan usia perkawinan, karena di Provinsi NTB tokoh agama dan tokoh masyarakat masih dijadikan sebagai panutan masyarakat.

Peserta pertemuan ini dari tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimat NU, NW dan Aisiyah yang berjumlah 50 orang.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk :

1. Meningkatkan pengetahuan/pemahaman peserta tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
2. Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan terkait pendewasaan usia perkawinan.
3. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek dalam rangka pendewasaan usia perkawinan,
4. Meletakkan dasar bagi mekanisme sosio-kultural yang dapat menjamin berlangsungnya proses perubahan.
5. Mendorong proses terjadinya perubahan perilaku kearah yang positif sehingga masyarakat dapat melaksanakan program secara baik sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab.
6. Hasil rekapitulasi yang dilakukan BP3AKB, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun di 10 Kabupaten/Kota termasuk UPT Provinsi ditahun 2014 mengalami penurunan yaitu sebesar 1.129 kasus yang sebelumnya ditahun 2011 sebanyak 1.152 kasus, meningkat ditahun 2012 menjadi 1.185 kasus dan terus mengalami peningkatan ditahun 2013 yaitu 1.187 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun yang banyak tercatat di wilayah Kabupaten Lombok Timur disusul Kota Mataram. Besarnya kasus kekerasan ini dipengaruhi juga oleh luasnya wilayah dan jumlah penduduk serta kesadaran dari masyarakat untuk melapor kasus-kasus-kasus kekerasan yang dialaminya.  
   Secara keseluruhan menurunnya angka kekerasan di NTB tak lepas dari upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemda dimasing-masing kabupaten/kota, makin tingginya tingkat kesadaran warga dalam memahami hukum sehingga berani melapor ke pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, LSM, Puskesmas disamping itu semakin baiknya sistem pencatatan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga semua kasus kekerasan dapat termonitor dengan baik. Upaya yang dilakukan dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya dengan sosilisasi pendewasaan usia perkawinan, dimana perkawinan usia dini akan memberikan kontribusi terhadap tingginya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi, ketidakharmonisan keluarga sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian, serta kasus lainnya yang lebih banyak merugikan kaum perempuan.
7. Evaluasi Proyek Kerja Sama Strengthening Women’s Rights (SWR) Untuk Pendewasaan Usia Perkawinan ( PUP) Di Provinsi Ntb.

Menjelang berakhirnya proyek kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang sudah berjalan sejak januari 2010 sampai April 2015. Selama 3 tahun pertama pelaksanaan proyek ini telah dapat mengembangkan dan menguji coba metode dan pendekatan baru untuk berbagai pengaturan. Sebuah tinjauan jangka menengah telah dilakukan pada tahun 2012 untuk mengevaluasi pelaksanaan serta mempersiapkan perpanjangan proyek selama 2 tahun. Perpanjangan pada tahap implementasi pertama selama dua tahun sudah dapat menempatkan penekanan kuat pada UP-Scaling, promosi dan mengamankan keberlanjutan dari keberhasilan yang telah diraih.

Evaluasi khusus untuk Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Provinsi NTB dilakukan dengan metode dialog warga melalui Focus Group Discution (FCD) dengan beberapa SKPD dan stake holder terkait.Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi dan mendukung promosi hasil SWR. Sesuai dengan standar GIZ PEV untuk transparansi dana kuntabilitas.

Peserta terdiri dari :

TPPKK, BKKBN, Dinas Kesehatan, PKBI dan BPPKB Kabupaten Loteng, BP3AKB Prov. NTB, LSM / Kaukus Peduli Perempuan Sebagai Fasilitator Dialog Warga Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sedangkan penerima manfaat adalah ; Kepala Desa Ubug Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai lokasi ujicoba pembentukan kelompok dialog warga. Beberapa Rekomendasi FGD : bahwa masing-masing mitra sepakat untuk melajutkan program yang sudah dilaksanakan oleh SWR khusus didalam pendewasaan usia perkawainan, pengembangan metode dialog warga.

Melihat dari penyebab permasalahan pernikahan dini didesa ubug disebabkan oleh putus sekolah maka desa ubug mengharapkan bantuan pendidikan bagi warga dengan diberikan Kartu Indonesia Pintar dan juga berharap adanya koordinasi dengan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kabupaten.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon arahan dan petunjuk serta tanggapan Ibu, Atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi,

SULIKANTI AGUSNI